



PAMERAN CIFTIS 2022 DI BEIJING

Pengunjung terlihat di Taman Shougang selama Pameran Internasional Tiongkok untuk Perdagangan Jasa (CIFTIS) 2022 di Beijing, Tiongkok, Sabtu (3/9). CIFTIS dibuka untuk umum pada hari Sabtu.

PBB Dorong Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif Agar Diakui Internasional

Hingga kini, belum ada negara manapun yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

KABUL(IM) - Wakil Kepala Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan Markus Potzel menyerukan Taliban agar membentuk pemerintahan inklusif. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar mereka memperoleh pengakuan internasional.

"Pertama-tama, pemerintahan harus memperoleh pengakuan domestik. Itu artinya berdasarkan pemilu, berdasarkan referendum, atau berdasarkan Loya-Jirga," kata Potzel, dikutip laman Asian News International, Minggu (4/9).

Loya jirga merupakan pertemuan tradisional tetua suku Afghanistan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkadang diadakan untuk memutuskan masalah kontroversial. Selain soal politik, Potzel turut

menyoroti kondisi ekonomi dan sosial yang memburuk di Afghanistan dan merekomendasikan agar pemerintahan saat ini yang dijalankan Taliban harus memperhatikan hal tersebut.

"Situasi ekonomi dan sosial Afghanistan sangat lemah," ucapnya.

Potzel juga menyampaikan keprihatinannya karena kurangnya konstitusi di Afghanistan. "Kita lihat bahwa tidak ada rencana dan tidak ada konstitusi serta tidak ada hukum yang lain," ujarnya.

Pekan ini, Taliban menyuarakan masyarakat internasional untuk mengakui mereka sebagai representasi pemerintahan yang sah di Afghanistan. Seruan itu disampaikan saat Taliban memperingati satu

tahun penarikan total pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara tersebut.

"Pengalaman selama 20 tahun terakhir dapat menjadi panduan yang baik. Segala jenis tekanan serta ancaman terhadap rakyat Afghanistan dalam 20 tahun terakhir telah gagal dan hanya meningkatkan krisis," kata Taliban dalam sebuah pernyataan, Rabu (31/8) lalu.

Taliban pun menegaskan bahwa Imarah Islam adalah pemerintahan yang sah dan perwakilan dari rakyat Afghanistan. Imarah Islam adalah nama yang diberikan Taliban untuk pemerintahan mereka setelah merebut kembali Afghanistan pada 15 Agustus tahun lalu.

Untuk memperingati satu tahun hari kebebasan yakni hari ketika pasukan AS sepenuhnya hengkang dari Afghanistan, Taliban menggelar pesta kembang api pada Rabu (31/9) lalu.

AS menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan pada

30 Agustus 2021. Pasukan Negeri Paman Sam sudah beroperasi selama 20 tahun di Afghanistan, tepatnya pasca serangan teror terhadap gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001.

Sebelum Taliban kembali berkuasa, AS merupakan sekutu utama pemerintahan Afghanistan dalam memerangi Taliban. Hingga kini, belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban.

Belum diperlihatkannya komitmen untuk memenuhi hak dasar warga Afghanistan, khususnya kaum perempuan, dinilai menjadi salah satu alasan masyarakat internasional belum memberi pengakuan kepada Taliban.

Pekan lalu kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak menunjukkan tanda-tanda moderasi. Menurutnya, kondisi di Afghanistan tetap memprihatinkan sejak Taliban berkuasa kembali di negara

tersebut pada Agustus tahun lalu.

"Afghanistan mungkin telah turun dari berita utama, tapi situasi masyarakatnya mengerikan. Dalam setahun terakhir, Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda moderasi, justru sebaliknya: Semua anak perempuan, terlepas dari janji sebelumnya, dilarang bersekolah; sebagian besar negara dicengkeram oleh kelaparan (70 persen dari populasi), dan banyak orang Afghanistan hidup dalam ketakutan atau pengasingan," kata Borrell dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Radio Free Europe, Minggu (28/8) lalu.

Menurutnya, hal itu menjadi alasan logis mengapa hingga saat ini belum ada satu pun negara mengakui kepemimpinan Taliban atas Afghanistan. "Rakyat Afghanistan membayar harga yang mahal untuk isolasi negara mereka: Tingkat bantuan kemanusiaan sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan," ucapnya. ● tom

Donald Trump Sebut Presiden AS Joe Biden Musuh Negara



DONALD TRUMP

WASHINGTON (IM) - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden Joe Biden sebagai musuh negara. Hal itu disampaikan setelah Biden mengatakan bawah Partai Republik mewakili ekstremisme yang mengancam pondasi Negeri Paman Sam.

"Dia (Biden) musuh negara. Anda ingin tahu kebenarannya, musuh negara adalah dia," kata Trump saat berbicara di sebuah rapat umum di Pennsylvania, Sabtu (3/9).

Trump menyoroti pernyataan Biden yang menyebut para pendukung gagasan "Make America Great Again" (MAGA) dan simpatisan Partai Republik berusaha menyelamatkan demokrasi AS. "Bahaya demokrasi datang dari kiri radikal, bukan dari kanan," ucapnya.

Pidato Trump di Pennsylvania digelar menjelang pemilu sela yang dijadwalkan digelar pada November mendatang. Itu merupakan penampilan publik pertama Trump sejak

kediamannya di Florida digeledah FBI menyusul dugaan adanya dokumen negara yang tak dikembalikan Trump ketika masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Hasil pemilu sela bisa menentukan apakah pemerintahan Biden akan kehilangan kendali atas kedua majelis di Kongres AS atau tidak. Saat berbicara di Pennsylvania, Trump sempat menyinggung tentang penggerebekan dan penggeledahan yang dilakukan FBI di kediamannya bulan lalu.

Menurut Trump, tindakan FBI merupakan "parodi keadilan".

"Tidak ada contoh yang lebih jelas dari ancaman yang sangat nyata dari kebebasan Amerika daripada hanya beberapa minggu yang lalu. Anda lihat, ketika kita menyaksikan salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang paling mengejutkan oleh pemerintahan mana pun dalam sejarah Amerika," ucapnya.

Trump menilai, penggeledahan itu merupakan pelanggaran hukum yang mengerikan. Kendati demikian, dalam pengajuan ke pengadilan, Departemen Kehakiman AS mengatakan, dokumen-dokumen pemerintah yang sangat rahasia, termasuk beberapa yang ditandai "sangat rahasia", ditemukan di kantor pribadi Trump selama penggerebekan. ● gul

Kembali dari Pelarian, Mantan Presiden Sri Lanka Diberi Rumah dan Pengawasan

KOLOMBO (IM) -Mantan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa diberikan tempat tinggal resmi dan keamanan oleh pemerintah pada Sabtu (3/9). Fasilitas ini diberikan saat Rajapaksa kembali ke Sri Lanka setelah mengakhiri pelariannya pada Juli lalu.

Rajapaksa melarikan diri pada 13 Juli menyusul protes besar-besaran akibat krisis ekonomi berkepanjangan. Massa juga menggeruduk kantor dan kediaman resmi presiden dan menuntut Rajapaksa untuk mundur. Rajapaksa mengundurkan diri setelah tiba di Singapura. Dia kemudian melanjutkan pelariannya ke Thailand.

Seorang juru bicara pemerintahan Sri Lanka dan kantor presiden belum memberikan komentar terkait kepulangan Rajapaksa. Mantan presiden itu bertemu dengan sekelompok anggota partai yang berkuasa dan anggota parlemen di bandara pada Sabtu pagi sebelum melanjutkan perjalanan ke kediaman yang disediakan

oleh pemerintah. "Apa yang dia katakan kepada kami tadi malam adalah bahwa dia butuh waktu karena dia bahkan tidak diizinkan keluar dari kamarnya karena alasan keamanan," kata seorang pejabat.

Pejabat itu menambahkan, Rajapaksa tidak diizinkan pergi ke gym. "Begitu dia menghabiskan beberapa waktu di kediaman, dia akan memberi tahu kami apa yang ingin dia lakukan," kata pejabat yang berbicara dengan syarat anonim.

Rajapaksa memiliki visa untuk tinggal di Thailand selama 90 hari. Tetapi dia bersama istrinya, seorang pengawal dan pembantu lainnya memilih untuk pulang ke Sri Lanka. Sementara itu, adik bungsu Gotabaya Rajapaksa, Basil Rajapaksa yang merupakan mantan menteri keuangan, bertemu dengan Presiden Ranil Wickremesinghe dan meminta untuk mengatur kepulangan mantan presiden.

Sri Lanka telah mengalami

kekurangan cadangan devisa sehingga tidak dapat mengimpor produk-produk penting seperti makanan, bahan bakar dan obat-obatan. Pandemi virus morona merupakan pukulan telak bagi industri pariwisata Sri Lanka dan mengurangi penerimaan uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri. Keduanya merupakan penghasil devisa utama bagi negara.

Gotabaya Rajapaksa, yang terpilih pada 2019 menjanjikan kemakmuran kepada penduduk Sri Lanka. Namun populasinya menukik tajam ketika negara itu mengalami krisis. Pemerintahan Rajapaksa dituduh memperkecil pemotongan pajak yang tidak berkelanjutan sehingga mendorong utang pemerintah dan memperburuk krisis.

Wickremesinghe dipilih oleh parlemen untuk meneruskan sisa masa jabatan Rajapaksa. Sejak itu, dia menindak protes jalanan dan menangkap aktivis terkemuka. ● ans

Milisi Bunuh 100 Orang di Ethiopia, Rumah Dibakar dan Dijarah

ETHIOPIA (IM) - Sedikitnya 100 warga di kota Oromia, Ethiopia dibunuh secara brutal oleh para milisi dari kelompok etnis terbesar kedua negara Afrika tersebut. Para penyerang juga membakar dan menjarah rumah para korban.

Serangan itu terjadi pada Senin pagi di Agamsa di Oromia, wilayah terbesar dan terpadat di Ethiopia yang sering diguncang bentrokan antara kelompok etnis Oromo dan Amhara. "Para penyerang menyerang dari tiga arah menggunakan tembakan

dan melanjutkan serangan mereka sampai sekitar pukul 14:00," kata seorang penyintas, yang melarikan diri dari Agamsa.

"Mereka membunuh sekitar 100 warga, membakar banyak rumah dan toko dan menjarah gudang makanan menggunakan becak, mobil dan sepeda motor. Saya melihat serangan itu dengan mata kepala sendiri, tetapi berhasil melarikan diri tanpa cedera," tuturnya.

Keduanya mengatakan para penyerang adalah anggota milisi yang berbasis di wilayah tetangga

Amhara. Penduduk setempat mengatakan serangan itu terjadi setelah pasukan regional yang bergilir meninggalkan daerah itu pada hari Minggu lalu, tetapi belum diganti.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menyalahkan Tentara Pembebasan Oromo atau Oromo Liberation Army (OLA), dengan mengatakan kelompok itu "menimbulkan kerusakan" pada orang-orang ketika para pejuangnya melarikan diri dari serangan pasukan keamanan di Oromia barat. ● tom

Protes Massal Anti-Pemerintah Guncang Praha

PRAHA(IM) - Puluhan ribu orang turun ke jalan di Ibu Kota Republik Ceko, Praha, pada Sabtu waktu setempat. Mereka ambil bagian dalam aksi protes yang disebut 'Republik Ceko Pertama'.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk mengundurkan diri karena melonjaknya harga energi, inflasi dan kebijakan internasional yang mereka yakini telah membawa negara itu terpuruk dalam keadaan seperti itu.

Menurut perkiraan polisi, sekitar 70.000 orang ambil bagian dalam aksi demonstrasi tersebut, dengan pihak penyelenggara memberikan angka yang lebih tinggi lagi yaitu 100.000 orang. Aksi protes tersebut menyatukan orang-orang dari berbagai kutub pandangan politik, dengan Partai Komunis dan Partai Kebebasan dan sayap kanan Demokrasi Langsung ikut serta dalam aksi protes tersebut.

"Tujuan dari demonstrasi kami adalah untuk menuntut perubahan, terutama dalam memecahkan masalah harga energi, terutama listrik dan gas, yang akan menghancurkan perekonomian kita musim gugur ini," kata salah satu penyelenggara aksi, sosial demokrat Jiri Havel, kepada media lokal seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (4/9).

Para pengunjuk rasa menuntut Republik Ceko untuk mengambil sikap militer yang netral, serta mengamankan kontrak langsung dengan pemasok gas, ter-

masuk Rusia. Mereka juga menuntut pemerintah karena mendukung sanksi Uni Eropa (UE) terhadap Moskwa, yang diadopsi dalam berbagai gelombang setelah konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

"Yang terbaik untuk Ukraina dan dua sweter untuk kami," bunyi salah satu spanduk yang dipajang dalam aksi, mengacu pada kenaikan biaya pemanas dan potensi pengurangan energi di musim dingin.

Protes itu terjadi sehari setelah pemerintah Ceko selamat dari mosi tidak percaya atas masalah yang sama, dengan kelompok oposisi menyalahkan pemerintah karena tidak bertindak setelah melonjaknya harga energi dan inflasi.

Perdana Menteri Ceko Petr Fiala, yang memimpin koalisi lima partai yang berkuasa, koalisi kanan-tengah, dengan cepat menuduh para pengunjuk rasa bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik negara, menyiratkan bahwa Kremlin mungkin memiliki andil dalam melakukan protes.

"Protes di Lapangan Wenceslas diserukan oleh pasukan yang pro-Rusia, dekat dengan posisi ekstrem dan bertentangan dengan kepentingan Republik Ceko," katanya kepada stasiun CTK.

"Jelas bahwa propaganda Rusia dan kampanye disinformasi hadir di wilayah kami dan beberapa orang hanya mendengarkannya," imbuhnya. ● gul

51 Kota di Iran Dilengkapi Sistem Pertahanan Sipil

TEHERAN(IM) - Sebanyak 51 kota di Iran dilengkapi dengan sistem pertahanan sipil untuk menggagalkan kemungkinan serangan asing. Seorang pejabat senior pertahanan pada Sabtu (3/9) mengatakan, sistem pertahanan sipil itu dipasang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

"Peralatan pertahanan sipil memungkinkan angkatan bersenjata Iran untuk mengidentifikasi dan memantau ancaman dengan menggunakan perangkat lunak sepanjang waktu sesuai dengan jenis ancaman dan risikonya," kata Wakil Menteri Pertahanan, Jenderal Mehdi Farahi seperti dikutip oleh media Iran.

Farahi menambahkan, bentuk perang hibrida termasuk serangan siber, biologis, dan radioaktif, telah menggantikan perang klasik. Namun, dia tidak secara spesifik

menyebut negara-negara yang bisa mengancam Iran.

Iran telah menuduh Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan dunia maya dalam beberapa tahun terakhir. Iran juga menuduh Israel menyabotase fasilitas nuklirnya. Sejauh ini Israel tidak membenarkan atau menyangkal bertanggung jawab atas serangan itu.

Ketegangan militer AS-Iran juga telah lama melanda kawasan itu. Dalam insiden terbaru, Iran menya drone layar militer AS di Laut Merah awal pekan ini.

Pada Selasa (30/8), Angkatan Laut AS telah menggagalkan upaya pasukan angkatan laut Pengawal Revolusi Iran untuk menangkap sebuah kapal perikanan tak berawak yang dioperasikan oleh Armada ke-5 AS di Teluk. Iran mengatakan pesawat tak berawak itu berbahaya bagi lalu lintas maritim. ● ans

Pelaku Pembunuhan Ratu Kecantikan Rusia Divonis 12 Tahun Penjara

MOSKOW (IM) - Seorang pria Rusia dinyatakan bersalah karena membunuh istrinya yang merupakan mantan bintang kontes kecantikan. Pria bernama Alexander Popov itu dijatuhi hukuman lebih dari satu dekade penjara oleh pengadilan Moskwa.

Rincian mengerikan dari kasus tersebut mengejutkan seluruh negeri. Pengadilan Distrik Sherbinsky Moskwa memvonis Alexander Popov atas pembunuhan istrinya Kseniya Popova (Sapozhnikova) pada Sabtu (3/9).

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun untuk kejahatan yang mengerikan itu. "Setelah memeriksa bukti yang diajukan para pihak, mengevaluasi bahan kasus, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah, yang menurutnya Alexander Popov dinyatakan bersalah atas pembunuhan istrinya dan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun," papar pernyataan pengadilan di Telegram.

Popov awalnya pergi ke polisi pada Januari untuk melaporkan istrinya hilang, mengklaim istrinya telah melakukan perjalanan ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Namun, penegak hukum segera menjadi curiga terhadap pria itu dan menjadikannya tersangka utama mereka.

Aparat menemukan Popova tidak pernah meninggalkan Rusia, sementara wawancara

dengan kerabatnya mengungkapkan mereka telah menerima pesan aneh darinya yang tidak sesuai dengan tingkah lakunya yang biasa.

Keraguan lebih lanjut tentang cerita Popov muncul ketika petugas menemukan dia telah mengirim putrinya pergi ke rumah seorang teman sekitar Agustus 2021, setelah itu dia terlihat mengangkut kantong sampah besar dari rumahnya. Popov akhirnya memvonis Alexander Popov atas pembunuhan istrinya setelah menghubungi polisi, dilaporkan mengaku membunuh istrinya dan bahkan menunjukkan kepada penyidik di mana dia membuang jasad istrinya.

Sementara dia kemudian mencabut kembali beberapa pengakuan, dia tetap dihukum berdasarkan bukti yang memberatkannya, meskipun pengadilan mencatat dia masih memiliki kesempatan mengajukan banding dalam waktu 10 hari dari putusan penjara selama 12 tahun," Popova adalah ratu kecantikan yang terkenal, dan dinobatkan sebagai pemenang kontes "Miss Kuzbass" pada tahun 2010.

Lahir di kota Novokuznetsk, Siberia, dia juga berusaha bersaing dalam kontes "Miss Russia" 2011. Dia pindah ke Moskwa bersama suaminya pada 2020, setelah Popov mendapatkan pekerjaan di Metro Moskwa. Dia sebelumnya menjabat sebagai pejabat pemerintah di kota asalnya. ● gul